

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR
KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU T.A 2018-2022**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

NAMA : ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN
NPM : 1905170192
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN
NPM : 1905170192
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU T.A 2018-2022.

Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(HENNY ZURIKA LUBIS, SE., M.Si)

Penguji II

(REZKI ZURRIAH, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(UMI KALSUM, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN
N.P.M : 1905170192
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK
MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU T.A 2018-2022.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(UMI KALSUM, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN
N P M : 1905170192
Dosen Pembimbing : Umi Kalsum, S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Penelitian : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN LABUHANBATU T.A 2018-2022

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Fenomena Latar Belakang, Rumusan Masalah, Sesuaikan Penulisan dengan Penyusunan Proposal.	7/3 2023	
Bab 2	Tambahkan teori Pendukung dan Kerangka Konsep, Penelitian terdahulu.	9/3 2023	
Bab 3	Teknik Analisis Data, Pengambilan data, tabel jadwal Penelitian.	9/3 2023	
Bab 4	- sesuaikan dengan foto yang benar	8/8 2023	
Bab 5	- Seoran sesuaikan dengan KESM Pulau.	8/8 2023	
Daftar Pustaka	- sesuaikan dengan menyimpulkan mendetail.	8/8 2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace sidang Meja hijau	15/8 2023	

Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum, S.E., M.Si)

Medan, 2023
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : Annisa Oktafiyani Pulungan
N.P.M : 1905170192
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul “**Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Labuhan Batu T.A 2018-2022.**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Annisa Oktafiyani Pulungan

ABSTRAK

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU T.A 2018-2022

Annisa Oktafiyani Pulungan

Program Studi : Akuntansi

Email : annisaoktafiyanipulungan@gmail.com

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari pengambilan data ke instansi. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif menggunakan laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022 masih belum optimal. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022 masih sangat rendah. Ini terlihat dari besarnya bantuan dari pendapatan pusat dan provinsi dibandingkan asli lokal Kabupaten Labuhanbatu. Tingkat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022 masuk dalam kategori sangat kurang Baik. Tingkat efisiensi Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022 termasuk dalam kategori kurang efisien. Dan Tingkat efektivitas Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022 termasuk dalam kategori cukup efektif.

Kata Kunci : Rasio Keuangan Daerah, Kinerja keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL RATIO TO MEASURE FINANCIAL PERFORMANCE IN REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY LABUHANBATU REGENCY FOR FISCAL YEAR 2018-2022

Annisa Oktafiyani Pulungan

Study Program : Accounting

Email : annisaoktafiyanipulungan@gmail.com

This research is research conducted to determine Regional Financial Ratio Analysis to Measure Financial Performance at the Regional Financial and Asset Management Agency of Labuhanbatu Regency FY 2018-2022. This research uses a descriptive approach with a quantitative type of research with secondary data sources obtained from data collection from agencies. The analysis carried out in this research used descriptive statistical analysis using budget realization reports. The results of this research indicate that the financial performance of the Labuhanbatu Regency Regional Financial and Asset Management Agency for the 2018-2022 period is still not optimal. The level of regional financial independence in Labuhanbatu Regency for 2018-2022 is still very low. This can be seen from the large amount of assistance from central and provincial income compared to local Labuhanbatu Regency. The level of fiscal decentralization of the Labuhanbatu Regency Government for 2018-2022 is in the very poor category. The efficiency level of Labuhanbatu Regency for 2018-2022 is included in the less efficient category. And the effectiveness level of Labuhanbatu Regency FY 2018-2022 is included in the quite effective category.

Keywords : Regional Financial Ratio, Financial Performance

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'at-nya kelak di hari akhir.

Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022”**. Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, mulai dari awal sampai dengan selesainya penulisan skripsi penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, terutama orang tua saya ayah Taufik Pulungan dan ibu saya Sri Rahmayanti S.Pd, serta kedua adik saya Intan Nurjannah Pulungan dan Muammar Husaini Pulungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan cukup baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, SE., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Umi Kalsum, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang bermanfaat untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Ibu Seprida Hanum Harahap S.E., S.S., M.Si selaku Dosen PA yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam permasalahan di perkuliahan.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Akuntansi atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Yang teristimewa teman saya terkhusus Elsa Anzaly, Soraya Azzuhra, Revina Oktania, Destari Amelia dan Siti Rahimah yang terus memberi semangat dan dukungan kepada peneliti dari awal perkuliahan hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dalam segi penulisan maupun isinya disebabkan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penelitian yang lebih baik. Semoga pskripsi ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Juni 2023

Penulis

ANNISA OKTAFIYANI P

NPM : 1905170192

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Kinerja Keuangan	10
2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan	17
2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	12
2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan	13
2.4 Pengukuran Kinerja Keuangan	13
2.5 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan	15
2.6 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah	16
2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)	17
2.6.2 Derajat Desentralisasi Fiskal	17
2.6.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	17
2.6.4 Rasio Efektivitas	19
2.7 Penelitian Terdahulu	20
2.8 Kerangka Berfikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian	24
3.2 Defenisi Operasional	24

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	26
3.4 Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Hasil Penelitian	32
4.1.1 Gambaran Umum BPKAD Labuhanbatu.....	32
4.1.2 Struktur Umum Organisasi BPKAD Labuhanbatu.....	35
4.1.3 Analisis Data.....	40
4.1.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	40
4.1.3.2 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.....	43
4.1.3.3 Rasio Efisiensi	46
4.1.3.4 Rasio Efektivitas	58
4.2 Pembahasan.....	51
4.2.1 Kinerja Keuangan Pada BPKAD Labuhanbatu Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	51
4.2.2 Kinerja Kinerja Keuangan Pada BPKAD Labuhanbatu Ditinjau Dari Rasio Desentralisasi.....	53
4.2.3 Kinerja Keuangan Pada BPKAD Labuhanbatu Ditinjau Dari Rasio Efisiensi.....	54
4.2.4 Kinerja Keuangan Pada BPKAD Labuhanbatu Ditinjau Dari Rasio Efektivitas	56
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	59
DAFTAR PUTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2020	4
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 3. 2 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	28
Tabel 3. 3 Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal	29
Tabel 3. 4 Kriteria Kemampuan Efisiensi Daerah.....	30
Tabel 3. 5 Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah.....	31
Tabel 4. 1 Rasio Kemandirian LRA Labuhanbatu	41
Tabel 4. 2 Rasio Desentralisasi LRA Labuhanbatu	44
Tabel 4. 3 Rasio Efisiensi LRA Labuhanbatu	46
Tabel 4. 4 Rasio Efektivitas LRA Labuhanbatu.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir	23
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah...	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang diamanatkan oleh undang-undang pemerintahan daerah adalah efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrument penting dalam mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) yang mana menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai semua kegiatan pembangunan.

Anggaran adalah rencana kegiatan perusahaan. Rencana ini mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain (Hanum, Z. 2010). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah merupakan tonggak dari sebuah perencanaan pembangunan suatu daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. APBD ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan Pemerintah Daerah sebagai catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan

tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif (Karlina & Nur Hamdayani, 2017).

Analisis kinerja keuangan pemerintah merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah karena dengan analisis kinerja ini pemerintah dapat mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya selama periode waktu tertentu. Dengan melakukan analisis kinerja keuangan, pemerintah dapat melihat bagaimana pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Maulina & Rhea, 2019).

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis Rasio Keuangan Daerah Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya (Machmud et al., 2014).

Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Anugeraheni & Yuniarta, 2022).

Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rasio efisiensi keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi (Sartika, 2019)..

Adanya analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi, rasio kinerja keuangan daerah akan membantu pemerintah dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilihat melalui laporan realisasi anggaran yang menyajikan banyak informasi terkait pendapatan, transfer, defisit, surplus, serta pembiayaan pada suatu entitas.

Penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Jalan Muhammad Idris Hasibuan, Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui dokumentasi, yaitu laporan realisasi anggaran pada tahun 2018-2022.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu bekerja untuk melaksanakan sebagian tugas dalam hal bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan badan. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu dijadikan sebagai bukti kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Penyusunan terhadap laporan pertanggungjawaban akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK atas pelaksanaan APBD. BPKAD juga melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan, yang

kemudian akan disusun berdasarkan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu BPKAD juga melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Berikut adalah gambaran perkembangan APBD Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu selama lima tahun anggaran :

Tabel 1.1 Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu

STRUKTUR APBD	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	1.221.119.537.810,74	1.318.715.109.320,71	1.177.755.366.136,15	1.342.106.703.518,75	1.251.239.536.921,87
PAD	162.794.472.016,74	175.335.685.316,71	161.486.609.119,15	238.194.215.393,75	184.403.843.981,87
Pendapatan Transfer	998.005.911.794,00	1.012.228.495.149,00	866.368.570.365,00	1.025.053.249.700,00	1.055.080.539.114,00
Lain-lain pendapatan yang sah	60.319.154.000,00	131.150.928.855,00	149.900.186.652,00	78.859.238.425,00	11.755.153.826,00
Belanja	1.014.725.929.999,08	1.219.197.719.894,99	1.066.968.079.257,92	1.266.143.502.119,61	1.301.836.435.729,18
Belanja Operasi	874.186.752.712,08	978.973.759.477,69	907.522.147.657,42	960.442.859.433,09	968.089.787.789,51
Belanja Modal	139.178.414.287,00	238.729.009.917,30	136.621.343.879,00	135.676.696.802,52	181.049.989.418,67
Belanja Tak Terduga	-	-	22.824.587.721,50	3.759.688.494,00	6.502.633.986,00
Belanja Transfer	-	-	-	166.264.257.390,00	146.194.024.526,00
Surplus/Defisit	70.811.738.670,23	(48.804.856.981,28)	(10.104.815.372,11)	75.963.201.399,14	(50.596.898.807,31)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	18.361.988.436,89	90.364.371.720,12	31.973.688.183,84	21.529.972.377,73	89.644.830.271,87
SILPA	18.127.093.936,89	89.892.319.720,12	31.766.754.183,84	21.401.299.377,73	89.601.820.271,87
Penerimaan Kembali Piutang	504.894.500,00	472.052.000,00	206.934.000,00	128.673.000,00	43.010.000,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	9.792.760.555,00	600.000.000,00	6.753.432.500,00	4.481.828.990,00
Penyertaan Modal Pemda	-	9.192.760.555,00	-	6.160.000.000,00	4.481.828.990,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	89.443.727.107,12	31.766.754.183,84	21.268.872.811,73	90.739.741.276,87	34.566.102.474,56

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu lebih besar diperoleh dari Pendapatan Transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya (PAD). Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu masih bergantung pada dana transfer dari pusat dan belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan menggali sumber asli daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sesuatu yang dasar dalam mempengaruhi APBD dikarenakan kontribusi PAD Terhadap APBD sangatlah besar, semakin besar PAD maka semakin minim suatu daerah yang bergantung kepada pemerintah pusat (Sari *et al*, 2020).

Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungannya terhadap bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat.

Dan belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu menunjukkan bahwa belanja rutin (operasi) masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (pembangunan). Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji ASN.

Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerahnya.

Tingkat belanja modal (pembangunan) yang tinggi memberikan gambaran dari infrastruktur dan sarana yang dibangun. Pada umumnya apabila tingkat pembangunan tinggi, maka akan meningkatkan pelayanan yang diterima oleh masyarakat setempat yang akan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja daerah tersebut. Hal ini membuktikan, semakin banyak belanja modal yang digunakan maka kemampuan dalam mengukur kinerja keuangan mengalami peningkatan (Sari *et al*, 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul: **“Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendapatan Kabupaten Labuhanbatu lebih besar diperoleh dari dana perimbangan atau dana transfer dibandingkan dengan pendapatan asli daerahnya
2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer.
3. Masih tingginya belanja operasi daripada belanja modal daerah.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah akan memudahkan peneliti dalam memahami pembahasan dari permasalahan dan sasaran yang dituju. Dengan demikian pembahasan dalam penelitian ini difokuskan banyaknya rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan namun dalam penelitian ini meneliti hanya dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio desentralisasi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dengan menggunakan Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas di latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2018-2022?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Desentralisasi pada tahun 2018-2022?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Efisiensi pada tahun 2018-2022?

4. Bagaimanakah kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Efektivitas pada tahun 2018-2022?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Desentralisasi pada tahun 2018-2022
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Efisiensi pada tahun 2018-2022
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Efektivitas pada tahun 2018-2022

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis dalam bidang sektor publik khususnya tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta

untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bagi pemerintah daerah

sebagai tambahan bahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dan alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan sumbangan wawasan dan sebagai bahan pembanding terhadap penelitian akuntansi yang berhubungan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Landasan Teori

2.1 Kinerja Keuangan

2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam pembuatan keputusan. Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya (Monalisa, 2022).

Pengertian kinerja keuangan secara umum adalah suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain (Hafsah, 2017).

Kinerja keuangan adalah salah satu cara untuk yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya kepada para pengguna dana dan juga untuk mencapai tujuan guna telah ditetapkan oleh perusahaan (Zulkarnain, 2020).

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis dan efektif, efisien dan akuntabel,

analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan (Budianto, 2020).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan suatu prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal tersebut sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dibuat untuk melihat suatu perusahaan telah melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Herawati, 2019).

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian untuk menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan indikator keuangan berdasarkan pada data realisasi pendapatan yang ada pada laporan APBD dengan tujuan untuk menilai hasil yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah guna sebagai bahan evaluasi untuk capaian tahun anggaran selanjutnya (Dja'wa, 2021).

Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian dari suatu perusahaan. Kinerja keuangan dapat diperoleh dari informasi yang terdapat

diperoleh dari laporan keuangan. Kinerja keuangan adalah prestasi kerja di bidang keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dan tertuang pada laporan keuangan dari perusahaan. Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan alat analisis (Dwiningwarni & Jayanti, 2019).

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Yasrie, 2018).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atas ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Patriati (2010) bentuk dari pengukuran kinerja dapat berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur pertanggungjawaban Kepala daerah berupa perhitungan APBD.

2.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil kinerja pencapaian daerah atas aktivitas tertentu yang menggunakan dana dalam bentuk belanja atau pembiayaan serta dana pendapatan yang diterima dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, sumbangan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Panggabean, 2019).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih accountable dan

semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi (Mulia, 2018).

2.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Berdasarkan Pasal 232 dari Permendagri No.13 Tahun 2006, Laporan keuangan Pemda berbasis kas terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

2.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja merupakan sebuah pencapaian dari apa yang telah direncanakan oleh organisasi. Jika pencapaian sesuai dengan yang telah direncanakan, maka kinerja dari organisasi dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika pencapaian melebihi dari yang telah direncanakan dapat dikatakan kinerja organisasi tersebut sangat baik. Namun, apabila perencanaan tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka kinerjanya dapat dikatakan buruk. Kinerja

keuangan merupakan suatu alat ukur yang menggunakan indikator keuangan (Faisal, 2020).

Pengukuran kinerja keuangan daerah memiliki tujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan dengan aktivitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas, tidak hanya sekedar menggambarkan tentang bagaimana pemerintah daerah mampu menyerap dan menggunakan anggaran, namun terlebih utama terletak pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis.

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mengukur kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan tersebut dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan menilai efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Dengan adanya pengukuran kinerja memungkinkan bagi unit kerja pemerintahan untuk memonitor kinerja dalam menghasilkan keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact) terhadap masyarakat, sehingga bermanfaat untuk membantu pimpinan instansi dalam memonitor dan memperbaiki kinerja serta fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik (Endang et al., 2014).

2.5 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan (Riadi, 2022).

Menurut (Zulkarnain, 2020) Terdapat beberapa manfaat pengukuran kinerja, diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja manajemen.
2. Dapat memberi arah pada pencapaian target kinerja.
3. Digunakan dalam memonitor atau mengevaluasi pencapaian kinerja.
Dalam kondisi tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif seperlunya untuk memperbaiki kinerja.
4. Digunakan sebagai dasar yang objektif untuk pemberian reward and punishment dari system pengukuran kinerja organisasi yang telah disepakati sebelumnya.
5. Dapat menjadi alat komunikasi diantara pimpinan dan bawahan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mampu membantu mengidentifikasi pemenuhan kepuasan masyarakat.
7. Mampu membantu memahami operasional kegiatan di instansi pemerintahan dan.

8. Untuk memastikan pengambilan keputusan telah dilakukan secara objektif.

2.6 Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mencerminkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan di daerahnya, yang kemudian dinilai untuk menentukan posisi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sendiri.

Kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dengan cara menganalisis rasio keuangan berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara (Susanto, 2019).

Penggunaan analisis rasio difokuskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yakni dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu dapat pula dilakukan pengukuran dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yang memiliki potensi daerah relatif sama untuk mengetahui bagaimana rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya (Susanto, 2019).

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh

dari hasil perbandingan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan relevan dan signifikan (Nuzulul Siswo Abdulaziz, 2021)

Bahwa Terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan angka yang dihasilkan dari perbandingan antara suatu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lainnya (Marliani, 2022). Rasio keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio efisiensi (Marliani, 2022).

2.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut (Zuhri & Soleh, 2016) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

seperti, dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) (Abdul Halim, 2007;234).

2.6.2 Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Menurut (Atul et al., 2022) Derajat Desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Apabila persentase kinerja keuangan lebih dari 50% maka dapat dikatakan rasio tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah dikatakan sangat baik.

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2010: 142).

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Bisma 2010 ; 78).

2.6.3 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan

karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

Suatu organisasi dapat dikatakan efisien apabila organisasi tersebut : (1) menghasilkan output yang lebih besar dengan menggunakan input tertentu; (2) menghasilkan output tetap dengan input lebih rendah dari yang seharusnya; (3) menghasilkan produksi yang lebih besar dari penggunaan sumber dayanya; dan (4) mencapai hasil dengan biaya serendah mungkin.

2.6.4 Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sinambela & Pohan, 2016).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Zuhri & Soleh, 2016).

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Suci Defiana Ruffit dan Desmiwerita (2020)	Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar	Variabel : Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan , Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan, Analisis Rasio Keuangan	<p>Hasil dari analisis kinerja pengelolaan APBD pada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2010 – 2014 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yaitu rasio desentralisasi, rasio kemandirian dan efektifitas pajak daerah, analisis keserasian belanja dan analisis efesiensi belanja yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tanah Datar masih sangat kurang b. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar termasuk rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan. c. Rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dikategorikan efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan. d. Rasio keserasian belanja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan rasio belanja modal dan rasio belanja operasi, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar lebih besar mengalokasikan belanjanya untuk belanja operasi. e. Rasio efesiensi belanja daerah Kabupaten Tanah Datar sudah sangat baik/efisien

			dalam menggunakan anggaran belanja daerah
Tiovanika E. Keintjem (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara	Variabel : Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Derajat Ketergantungan, Rasio Derajat Desentralisasi,	Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung tahun 2016 - 2020 masih dalam kategori kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dari pengelolaan pendapatan asli daerah yang sudah baik, namun dari sisi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan efisiensi belanja daerah yang belum baik. Adapun faktor penghambat kinerja keuangan daerah Kota Bitung adalah potensi daerah dalam hal pariwisata yang belum dioptimalkan bahkan belum dimanfaatkan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung untuk mengatasi faktor penghambat tersebut adalah dengan meningkatkan potensi-potensi daerah seperti pariwisata, perkebunan kelapa dan perikanan
Asih Nurajijah dan Dina Nurfadila (2022)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota SukaBumi Periode 2017-2021	Variabel : Kenirja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Pemda, Rasio Belanja Modal	- Kemampuan keuangan pemerintah daerah kota Sukabumi dalam merealisasikan PAD ternyata menurun menjadi kurang efektif. Dimana sebelumnya pada tahun 2017-2018 dikatakan efektif.

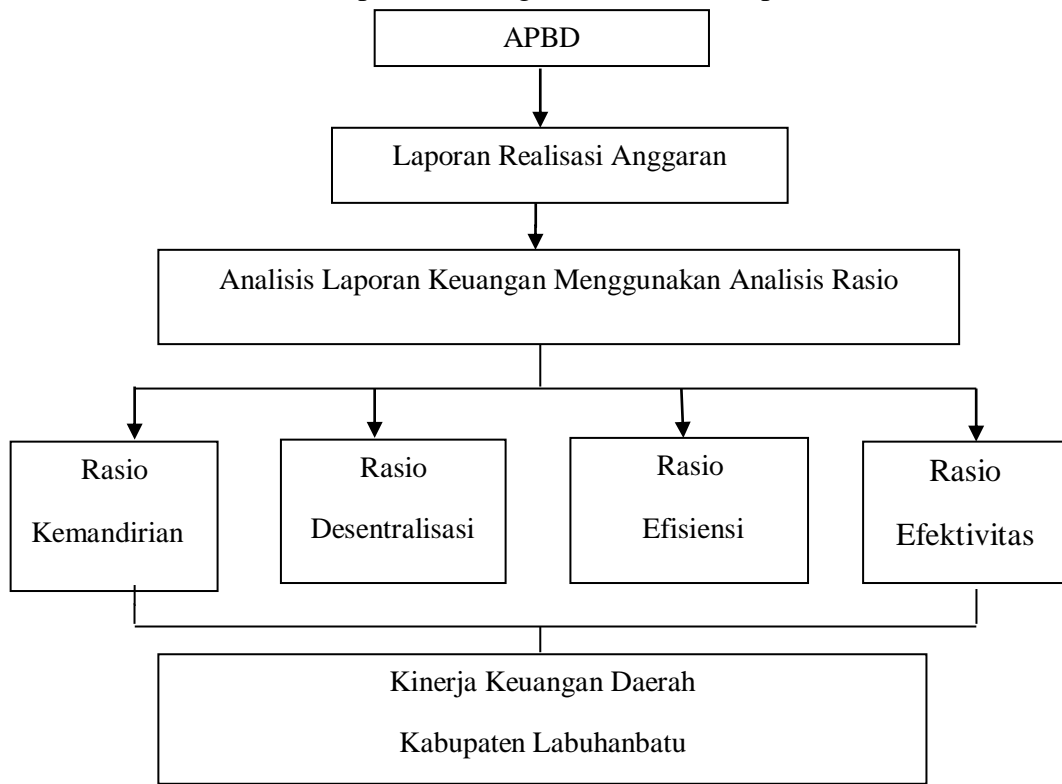
2.8 Kerangka Berfikir

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun tertentu. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu menyangkut pelaporan tentang penggunaan anggaran dalam periode anggaran apakah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian target kinerja yang telah disepakati.

Menganalisis kinerja keuangan adalah suatu proses mengenal tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun 2018-2022 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa rasio keuangan daerah, antara lain : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efisien, dan Rasio Efektivitas.

Dengan menggunakan beberapa rasio-rasio di atas dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Jika semua rasio diatas menunjukkan hasil persentase yang sesuai kriteria, maka diambil keputusan hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dapat dikatakan baik.

Berikut ini di tampilkan kerangka berfikir dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, Menurut Sugiyono (2012:13) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable yang lain.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang mencakup beberapa parameter rasio, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2. Derajat Desentralisasi fiskal

Derajat Desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Adapun Rumus Rasio Desentralisasi yaitu:

$$Rasio\ Desentralisasi = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun Rumus Rasio Efisiensi yaitu:

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah/Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah/Desa}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Adapun Rumus Rasio Efektivitas yaitu:

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Jl. Muhammad Idris Hasibuan, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Penelitian ini fokus pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu tahun anggaran 2018-2022.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada Januari 2023 hingga maret 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

No	Aktivitas Penelitian	Februari 2023				Maret 2023				April 2023				Mei 2023				Juni 2023				Juli 2023	Agustus 2023
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1,2,3,4	1,2,3,4
1	Prariset	■	■																				
2	Pengajuan judul			■	■	■	■																
3	Pengumpulan Data							■	■	■	■												
4	Penulisan Proposal									■	■												
5	Bimbingan Proposal											■	■	■	■								
6	Seminar Proposal																			■			
7	Penulisan Skripsi																				■	■	
8	Bimbingan Skripsi																				■	■	■
9	Sidang Meja Hijau																				■	■	■

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisa data. Berupa bukti catatan atau laporan realisasi anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018-2022, pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data-data yang ada dalam dokumen instansi pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018-2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan mengumpulkan data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menyajikan dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator Kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu menggunakan rasio-rasio sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Kinerja Keuangan	Persentase Kemandirian (%)	Kemampuan Daerah
Rendah sekali	0% - 25%	Intruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2019

- a. Instruktif : Peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

- b. Konsultatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Partisipatif : Peran pemerintah pusat mulai berkurang karena tingkat kemandirian mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Delegatif : Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Menurut (Atul et al., 2022) Derajat Desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Apabila persentase kinerja keuangan lebih dari 50% maka dapat dikatakan rasio tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah dikatakan sangat baik.

Rasio desentralisasi dirumuskan sebagai berikut:

$$Rasio\ Desentralisasi = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3 Kriteria Kemampuan Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Kinerja Keuangan	Persentase Desentraliasi %
Sangat kurang	0% – 10%
Kurang	10% – 20 %
Sedang	20% – 30%
Cukup	30% – 40%
Baik	40% – 50%
Sangat baik	>50%

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2019

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

Rasio Efisiensi Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja\ Daerah/Desa}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah/Desa} \times 100\%$$

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Kemampuan kinerja keuangan	Persentase efisiensi %
Tidak efisien	100% keatas
Kurang Efisien	90-100%
Cukup Efisien	80-90%
Efisien	60-80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 (dalam Rahayu,dkk,2019)

4. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sinambela & Pohan, 2016).

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Zuhri & Soleh, 2016). Rasio Efektivitas Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.5

Kriteria Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (100%)
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum BPKAD Labuhanbatu

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1096). Kemudian pada Tahun 2008, berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu dan UU Nomor 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Kabupaten Labuhanbatu dibagi menjadi tiga wilayah kabupaten otonom yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2009. Berdasarkan hasil pemekaran, wilayah Kabupaten Labuhanbatu yang sebelumnya terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan menjadi 9 (sembilan) kecamatan dengan jumlah penduduk 418.992 jiwa.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang bidang Keuangan dan tugas pembantuan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu memiliki Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap. Kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah

pelaksana dibidang pengelolaan keuangan dan pengelolan asset daerah, yang terdiri dari bidang perencanaan anggaran daerah, bidang perbendaharaan daerah, bidang akuntansi dan pelaporan, dan bidang pengelola barang milik daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah berdasarkan PERATURAN BUPATI LABUHANBATU NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU. Beratnya tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu menyebabkan para pegawai pada Kantor tersebut harus memiliki profesionalitas dan kinerja yang optimal.

Adanya target kerja seperti target penganggaran atau perencanaan belanja daerah yang harus cepat, tepat dan akurat, penutupan kas setiap akhir tahun, pembuatan Laporan Keuangan Daerah tepat waktu dan melakukan proses pencairan SP2D seluruh OPD yang ada di Kabupaten Labuhanbatu mengharuskan pegawai melakukan lembur sampai jam 24.00 wib. Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan terjadinya peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membantu pegawai dalam mengatasi konflik atau masalah secara tepat, mampu menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan sehingga menghasilkan prestasi kerja yang tinggi pula. Sedangkan kecerdasan emosional yang rendah akan berdampak buruk pada mereka, karena pegawai kurang mampu dalam mengambil keputusan secara rasional dan tidak dapat menghadapi konflik secara tepat. Emosi mempunyai peran besar untuk menentukan suatu tindakan

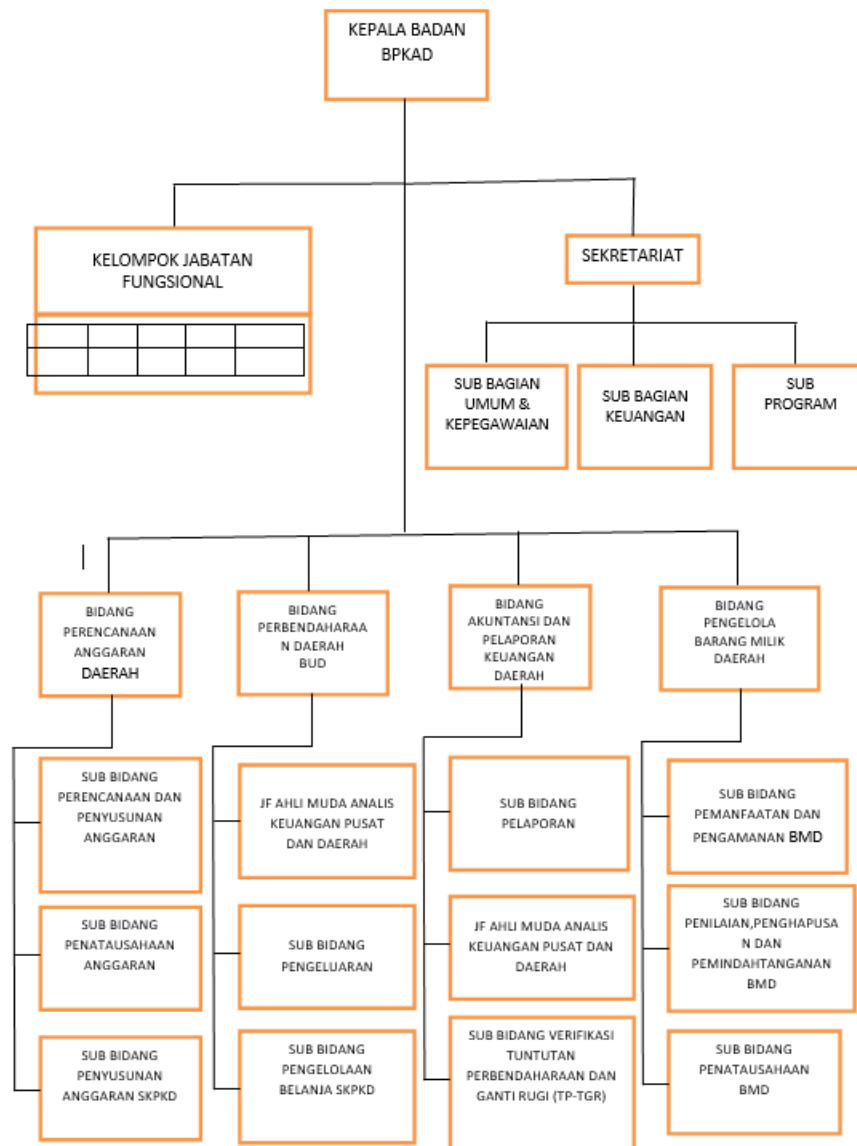
dalam proses pengambilan keputusan “rasional”. Kecerdasan intelektual juga merupakan sumber daya terpenting bagi suatu perusahaan atau organisasi yaitu orang yang telah memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka pada organisasi. Untuk menemukan fakta objektif, akurat, dan untuk memprediksi resiko, melihat konsekuensi dari setiap keputusan yang ada, kita bisa menggunakan kecerdasan intelektual yang menonjolkan kemampuan logika berpikir.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu merupakan lembaga teknis daerah dan bagian dari perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas-tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Lokasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Lokasi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada di jalan Muhammad Idris Hasibuan, Rantauprapat yang berada di belakang kantor Bupati kabupaten Labuhanbatu. 3 Daerah Jangkauan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Daerah yang menjadi ruang lingkup pekerjaan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah daerah-daerah yang berada di kawasan Kabupaten Labuhanbatu yang terdiri dari 9 kecamatan, yaitu : 1) Rantau Utara 2) Rantau Selatan 3) Bilah Barat 4) Bilah Hulu 5) Bilah Hilir 6) Pangkatan 7) Panai Hulu 8) Panai Tengah 9) Panai Hilir.

4.1.2 Struktur Umum Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Gambar IV. I

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Keterangan :

1. Kepala Badan bertugas Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang penyusunan rencana program kerja, penyusunan bahan, penyiapan bahan dan rencana anggaran di lingkungan Badan.
2. Sekretariat bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKAD dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan perencanaan, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan serta aplikasi sistem informasi.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal bidang urusan pengelolaan administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perlengkapan dinas.
4. Sub Bagian Keuangan bertugas Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam hal bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan badan.
5. Sub Bagian Program bertugas Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang penyusunan rencana program kerja, penyusunan bahan, penyiapan bahan dan rencana anggaran di lingkungan Dinas.
6. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Kebijakan

Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahan APBD.

7. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan perumusan kebijakan Umum APBD (KUA), dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Daerah (RAPBD) dan Perubahan APBD.
8. Sub Bidang Penata Usahaan Anggaran bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penata usaha anggaran pendapatan dan belanja langsung.
9. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Daerah dan perubahannya meliputi Penerimaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Daerah, Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan dan Daerah dan Pembiayaan.
10. Bidang Perbendaharaan Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam melakukan pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah.
11. Sub Bidang Penata Usahaan BUD bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam mengumpulkan bahan, memeriksa surat-surat perintah atau penerimaan, pembayaran uang, meneliti tanda bukti penagihan atau setoran serta pelaporan anggaran.

12. Sub Bidang Pengelolaan Belanja SKPKD bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam Mengumpulkan bahan dan memeriksa serta meneliti Administrasi bukti belanja hibah dan bantuan sosial serta pembiayaan.
13. Sub Bidang Pengeluaran bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam mengumpulkan bahan, memeriksa, serta meneliti administrasi bukti pengeluaran.
14. Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintahan Daerah serta mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD dan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
15. Sub Bidang Pelaporan bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam mempersiapkan penyusunan Rancangan peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
16. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan bertugas Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah serta mempersiapkan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sub Bidang Verifikasi, Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) bertugas Melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam mengumpulkan bahan, memverifikasi dan merekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran bulanan satuan kerja perangkat daerah buku kas umum buku bantu bank, buku bantu kas tunai, buku bantu penerimaan dan penyoretan pajak buku rincian objek penerimaan dan pengeluaran serta menyusun laporan bulanan realisasi pelaksanaan APBD arus kas bulanan dan jurnal penerimaan dan pengeluaran menerima dan menginventarisasi dokumen dan menyusun laporan kasus-kasus kerugian daerah melakukan penelitian verifikasi dokumen dan menyusun laporan kerugian daerah melaksanakan langkah langkah penyelesaian kerugian daerah sesuai peraturan ketentuan perundang undangan serta melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam penyelesaian tugasnya kepada bupati melalui sekretaris daerah .

17. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam menyiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang meyangkut tentang pengamanan penelitian penghapusan pemindahtanganan dan penata usahaan aset.
18. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan dan data tentang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah.
19. Sub Bidang Penilaian, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal

menyiapkan bahan dan data tentang sub bidang penilaian, penghapusan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah.

20. Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah bertugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pencatatan dan pelaporan tentang aset milik daerah.

4.1.3. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah Labuhanbatu dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah. data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran. Data tersebut yang akan dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu selama waktu 5 tahun terakhir (2018-2022). Adapun hasil dari analisis rasio sebagai berikut:

4.1.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian Keuangan Daerah dijelaskan pada besarnya Pendapatan Asli Daerah yang membandingkan dengan Pendapatan Daerah yang asalnya dari sumber lain (Pendapatan Transfer) ialah Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Bagi hasil pajak, Alokasi khusus, Dana alokasi umum, dana darurat dan pinjaman (Digdowiseiso & Satrio, 2022).

Adapun Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu:

$$RKKD = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4.1. Rasio Kemandirian LRA Labuhanbatu

Tahun	PAD	Pendapatan transfer	RKKD	Pola Hubungan
2018	162,794,472,016	998,005,911,794	16.31%	Instruktif
2019	175,335,685,316	1,012,228,495,149	17.32%	Instruktif
2020	161,486,609,119	866,368,570,365	18.64%	Instruktif
2021	238,194,215,393	1,025,053,249,700	23.24%	Instruktif
2022	184,403,843,981	1,055,080,539,114	17.48%	Instruktif

Sumber : LRA Labuhanbatu (2023)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan perhitungan rasio kemandirian dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Labuhan Batu, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} RKKD \text{ Tahun } 2018 &= \frac{162,794,472,016}{998,005,911,794} \times 100\% \\ &= 16,31\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 16,31%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian di tahun 2018 adalah rendah sekali dan termasuk pola Instruktif.

$$\begin{aligned} RKKD \text{ Tahun } 2019 &= \frac{175,335,685,316}{1,012,228,495,149} \times 100\% \\ &= 17,32\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 17,32%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian di tahun 2019 adalah rendah sekali dan termasuk dalam pola Instruktif.

$$\begin{aligned} RKKD \text{ Tahun } 2020 &= \frac{161,486,609,119}{866,368,570,365} \times 100\% \\ &= 18,64\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 18,64 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian di tahun 2020 adalah rendah sekali dan termasuk pola hubungan Instruktif.

$$\begin{aligned} RKKD \text{ Tahun } 2021 &= \frac{238,194,215,393}{1,025,053,249,700} \times 100\% \\ &= 23,24\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 23,24 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian di tahun 2021 adalah rendah sekali termasuk dalam pola Instruktif.

$$\begin{aligned} RKKD \text{ Tahun } 2022 &= \frac{184,403,843,981}{1,055,080,539,114} \times 100\% \\ &= 17,84\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 17,84 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian di tahun 2022 adalah rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif.

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2018-2022 tingkat kemandiriannya mengalami kenaikan dan penurunan, perhitungan rasio kemandirian tertinggi berada di tahun 2021 sebesar 23,24% dan yang paling terendah berada di tahun

2018 sebesar 16,31%. Tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2019, 2020, dan 2022 masing-masing sebesar 17,32%, 18,64% dan 17,48%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya Rasio kemandirian keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2022 dapat dikategorikan rendah sekali dimana pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% - 25%.

Demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan Instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah atau tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat tidak mampu melaksanakan urusan otonomi.

4.1.3.2 Derajat Desentralisasi fiskal

Derajat Desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal adalah kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Adapun Rumus Rasio Desentralisasi yaitu:

$$Rasio\ Desentralisasi = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2. Rasio Desentralisasi LRA Labuhanbatu

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi	Kriteria
2018	162,794,472,016	1,221,119,537,810	13.33%	Kurang Baik
2019	175,335,685,316	1,318,715,109,320	13.30%	Kurang Baik
2020	161,486,609,119	1,177,755,366,136	13.71%	Kurang Baik
2021	238,194,215,393	1,342,106,703,518	17.75%	Kurang Baik
2022	184,403,843,981	1,251,239,536,921	14.74%	Kurang Baik

Sumber : LRA Labuhan Batu (2023)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan perhitungan rasio desentralisasi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Labuhanbatu, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Desentralisasi 2018} &= \frac{162,794,472,016}{1,221,119,537,810} \times 100\% \\ &= 13,33\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio desentralisasi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 13,33%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio desentralisasi di tahun 2018 adalah kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Desentralisasi 2019} &= \frac{175,335,685,316}{1,318,715,109,320} \times 100\% \\ &= 13,30\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio desentralisasi di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 13,30 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio desentralisasi di tahun 2019 adalah kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Desentralisasi 2020} &= \frac{161,486,609,119}{1,177,755,366,136} \times 100\% \\ &= 13,71\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio desentralisasi di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 13,71 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio desentralisasi di tahun 2020 adalah kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Desentralisasi 2021} &= \frac{238,194,215,393}{1,342,106,703,518} \times 100\% \\ &= 17,75\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio desentralisasi di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 17,75 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio desentralisasi di tahun 2021 adalah kurang baik.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Desentralisasi 2022} &= \frac{184,403,843,981}{1,251,239,536,921} \times 100\% \\ &= 14,74\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio desentralisasi di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 14,74%, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio desentralisasi di tahun 2022 adalah kurang baik.

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio desentralisasi tahun 2018-2022 rasio desentralisasi tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 17,75% dan paling rendah di tahun 2019 sebesar 13,30%. Tahun-tahun lainnya yaitu tahun 2018, 2020, dan 2022 masing-masing sebesar: 13,33%, 13,71%, dan 14,74%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Pada perhitungan rasio desentralisasi fiskal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2018-2022 dikatakan kurang baik karena berada diantara 10% - 20%.

4.1.3.3 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Adapun Rumus Rasio Efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah/Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah/Desa}} \times 100\%$$

Tabel 4.3. Rasio Efisiensi LRA Labuhan Batu

Tahun	Realisasi pendapatan	Realisasi belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2018	1,221,119,537,810	1,014,725,929,999	83,10%	Cukup Efisien
2019	1,318,715,109,320	1,219,197,719,894	92,45%	Kurang Efisien
2020	1,177,755,366,136	1,066,968,079,257	90,59%	Kurang Efisien
2021	1,342,106,703,518	1,266,143,502,119	94,34%	Kurang Efisien
2022	1,251,239,536,921	1,301,836,435,729	104,04%	Tidak Efisien

Sumber : LRA Labuhan Batu (2023)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan perhitungan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Labuhanbatu, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2018} &= \frac{1,014,725,929,999}{1,221,119,537,810} \times 100\% \\ &= 83,10\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 83,10 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2018 adalah cukup efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2019} &= \frac{1,219,197,719,894}{1,318,715,109,320} \times 100\% \\ &= 92,45\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 92,45 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2019 adalah kurang efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2020} &= \frac{1,066,968,079,257}{1,177,755,366,136} \times 100\% \\ &= 90,59\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 90,59 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2020 adalah kurang efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2021} &= \frac{1,266,143,502,119}{1,342,106,703,518} \times 100\% \\ &= 94,34\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 93,34 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2021 adalah kurang efisien.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi 2022} &= \frac{1,301,836,435,729}{1,251,239,536,921} \times 100\% \\ &= 104,04\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 104,04 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi di tahun 2022 adalah tidak efisien.

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio efisiensi diketahui mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2018 termasuk dalam kategori cukup efisien dikarenakan berada diantara 80-90%. Ditahun 2019, 2020, dan 2021 sebesar 92,45%, 90,59%, dan 94,34% termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90-100%, sedangkan ditahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 104,04% termasuk dalam kategori tidak efisien dikarenakan berada diatas 100% dan memiliki nilai rata-rata tahun 2018-2022 sebesar 92,91% atau dapat dikatakan kurang efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori kurang efisien.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dikatakan efisien jika rasio yang dicapai kurang dari satu atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Anggaran & Pandawa, 2016).

4.1.3.4 Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai

mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Adapun Rumus Rasio Efektivitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.4. Rasio Efektifitas LRA Labuhan Batu

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Rasio Efektifitas	Kriteria
2018	162,794,472,016	180,542,687,295	90.17%	Efektif
2019	175,335,685,316	240,318,936,755	72.96%	Kurang Efektif
2020	161,486,609,119	225,869,464,200	71.50%	Kurang Efektif
2021	238,194,215,393	239,690,323,904	99.38%	Efektif
2022	184,403,843,981	214,870,699,556	85.82%	Cukup Efektif

Sumber : LRA Labuhanbatu (2023)

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan perhitungan rasio efektifitas dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah Labuhanbatu, dan berikut diuraikan perhitungannya :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas 2018} &= \frac{162,794,472,016}{180,542,687,295} \times 100\% \\ &= 90,17\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektifitas di tahun 2018 didapatkan hasil sebesar 90,17 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektifitas di tahun 2018 adalah efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas 2019} &= \frac{175,335,685,316}{240,318,936,755} \times 100\% \\ &= 72,96\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas di tahun 2019 didapatkan hasil sebesar 72,96 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektivitas di tahun 2019 adalah kurang efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas 2020} &= \frac{161,486,609,119}{225,869,464,200} \times 100\% \\ &= 71,50\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas di tahun 2020 didapatkan hasil sebesar 71,50 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektivitas di tahun 2020 adalah kurang efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas 2021} &= \frac{238,194,215,393}{239,690,323,904} \times 100\% \\ &= 99,38\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas di tahun 2021 didapatkan hasil sebesar 99,38 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektivitas di tahun 2021 adalah efektif.

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas 2022} &= \frac{184,403,843,981}{214,870,699,556} \times 100\% \\ &= 85,82\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas di tahun 2022 didapatkan hasil sebesar 85,82 %, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektivitas di tahun 2022 adalah cukup efektif.

Berdasarkan perhitungan di atas terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio efektivitas pada tahun 2018 dan 2021 tergolong efektif yaitu sebesar 90,17% dan 99,38% karena berada diantara 90-100%. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan sebesar 72,96% dan 71,50% yang termasuk dalam kategori kurang

efektif Karena berada diantara 60-80% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 85,82% yang termasuk dalam kategori cukup efektif karena berada diantara 80-90%. Pada dasarnya analisis Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Zuhri & Soleh, 2016).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diketahui jika realisasi PAD Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Labuhanbatu sebesar Rp 162.794.472.016,74. Mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi Rp 175.335.685.316,71. Pada tahun 2020 PAD mengalami penurunan menjadi Rp 161.486.609.119,15. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 238.194.215.393,75. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 184.403.843.981,87.

Menurut (Zuhri & Soleh, 2016) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli

Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah seperti, dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (PAD) (Abdul Halim, 2007;234).

Berdasarkan hasil penelitian terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2018-2022 tingkat kemandirian mengalami kenaikan dan penurunan. Dapat dilihat perhitungan tingkat kemandirian tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 23,24%, tingkat kemandirian yang terendah pada tahun 2018 sebesar 16,31% dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio kemandirian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori rendah sekali Karena berada diantara 0-25% dan dalam pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pemerintah daerah.

Rasio kemandirian yang masih sangat rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung

pada bantuan dari pemerintah pusat. Jadi, Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu secara keseluruhan dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sedikit dan belum bisa diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunannya.

Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

4.2.2. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi 2010: 142).

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Bisma 2010 ; 78).

Berdasarkan hasil penelitian terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio desentralisasi tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan perhitungan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 17,75%, terendah pada tahun 2019 sebesar 13,30%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio desentralisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori kurang baik karena berada diantara 10-20%.

Suci Defiana Rufit dan Desmiwerita (2020) bahwa dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan hasil Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Tanah Datar masih sangat kurang baik. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.

4.2.3. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan

karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 persen.

Berdasarkan hasil penelitian terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio efisiensi tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan perhitungan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 104,04%, terendah pada tahun 2018 sebesar 83,10% dan didapatkan nilai rata-rata sebesar 92,91%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90-100%.

Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini masih kurang efisien karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah..

Tiovanika E. Keintjem (2022) melakukan penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dalam Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara, mendapatkan hasil bahwa bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bitung tahun 2016 -

2020 masih dalam kategori kurang baik. Hal tersebut dibuktikan dari pengelolaan pendapatan asli daerah yang sudah baik, namun dari sisi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dan efisiensi belanja daerah yang belum baik.

4.2.4. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Sinambela & Pohan, 2016). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen (Zuhri & Soleh, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian terkait kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari Rasio efektivitas tahun 2018-2022 mengalami kenaikan dan penurunan perhitungan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 99,38%, terendah pada tahun 2020 sebesar 71,50% dan didapatkan nilai rata-rata sebesar 83,96%, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektivitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori cukup efektif. Hal ini sejalan dengan Asih Nurajijah dan Dina Nurfadila (2022) dalam penelitiannya mendapatkan hasil Kemampuan keuangan pemerintah daerah kota Sukabumi

dalam merealisasikan PAD ternyata menurun menjadi kurang efektif. Dimana sebelumnya pada tahun 2017-2018 dikatakan cukup efektif.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Kabupaten Labuhanbatu cukup efektif karena rata-rata efektivitasnya yaitu 83,96%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah karena yang dianggarkan lebih besar daripada realisasinya. Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu bergantung dengan pemerintah pusat.
2. Rasio desentralisasi tahun 2018-2022 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori kurang baik.
3. Rasio efisiensi tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwasannya rasio efisiensi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori kurang efisien.
4. Rasio efektivitas tahun 2018-2022 dapat disimpulkan bahwasannya rasio efektivitas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu berada dalam kategori kurang efektif.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPKAD Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan rasio kemandirian daerah, diperlukan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dengan mengerahkan instansi dan dinas terkait sesuai dengan perencanaan dan pengawasan di lapangan

sehingga akan dapat meningkatkan rasio kemandirian daerah.

2. Berkaitan dengan rasio desentralisasi, karena dalam kategori yang kurang baik instansi hendaknya meningkatkan pendapatan asli daerah yang dianggarkan sehingga mampu menjadi sumber pemasukan inti daerah dan meningkatkan rasio desentralisasi.
3. Berkaitan dengan rasio efisiensi, karena dalam kategori yang kurang efisien, instansi hendaknya meningkatkan realisasi pendapatan daerah sehingga dapat lebih besar dari realisasi belanja daerah, dan mampu melaksanakan pembangunan daerah dengan menggunakan anggaran belanja dari pendapatan yang didapatkan.
4. Berkaitan dengan rasio efektifitas, karena dalam kategori kurang efektif, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Proses pengumpulan data terkendala pada sistem kebijakan instansi yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam mengeluarkan data internal perusahaan seperti LRA dan data yang berhubungan dengan judul penelitian
2. Dalam penelitian ini pembahasan hanya fokus kepada rasio keuangan daerah sehingga perlu dilakukan perluasan pembahasan untuk selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran, T., & Pandawa, J. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013*. 1(1), 40–54.
- Atul, U. N., Sari, Y. N. I., & Lestari, Y. J. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 89–96. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1396>
- Budianto, A. (2020). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Statistik Diskominfo*, 7(3), 5–15.
- Digdowiseiso, K., & Satrio, M. B. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Ketergantungan Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 2622–2205.
- Dja'wa, A. (2021). Analisis Kemampuan Serta Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012-2016. *Cakrawala Ilmiah*, 1(4), 481–488.
- Dwiningwarni, S. S., & Jayanti, R. D. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Koperasi Serba Usaha. *J-MACC : Journal of Management and Accounting*, 2(2), 125–142. <https://doi.org/10.52166/j-macc.v2i2.1659>
- Endang, K. U. S., Rahayu, M., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2014). *Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 – 2012*.
- Hafsah, H. (2017). Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menganalisis Current Ratio, Quick Ratio dan Return On Investment. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(6), 1–10. <http://jurnal.umsu.ac.id/>
- Hanum, Z. S. E. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*, 11(1).
- Herawati, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(1), 16–25.
- Karlina, A., & Nur Hamdayani. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Apbd Kota Surabaya Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 911–924.

- Machmud, M., Kawung, G., & Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2), 1–13.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(1), 11–20. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i1.84>
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Jurnal OBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22. <https://jurnal.polteq.ac.id/index.php/obis/article/download/30/12>
- Monalisa, M. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Rasio Keuangan. *Jurnal Health Sains*, 3(8), 1062–1071. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i8.462>
- Mulia, R. (2018). (2018) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI kualitas LKPD Kab Pasaman Brt. *Jurnal El-Riyasah*, 9, 1–15.
- Nuzulul Siswo Abdulaziz. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(2), 646–659. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i2.142>
- Panggabean, F. Y. (2019). Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 151. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2692>
- Riadi, M. (2022). *Pengukuran Kinerja Guru*. 1(1), 1–4. [http://eprints.uny.ac.id/8598/3/bab 2 -08404241015.pdf](http://eprints.uny.ac.id/8598/3/bab%20-%2008404241015.pdf)
- Rufit, S. D., & Desmiwerita. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Pareso Jurnal*, 2(2), 277. <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/120/99>
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i2.1207>
- Sinambela, E., & Pohan, A. K. R. (2016). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 53(9), 1689–1699. journal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/download/2056/2050

- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Yasrie, A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014-2016. *Jurnal Riset Inspirasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 67–81. <https://doi.org/10.35130/jrimk.v1i2.7>
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
4	PENDAPATAN - LRA	1.277.566.050.295,00	1.221.119.537.810,74	95,58	1.164.296.889.256,34
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	180.542.687.295,00	162.794.472.016,74	90,17	124.674.017.375,34
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	49.550.000.000,00	39.052.031.654,84	78,81	34.078.320.116,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	11.617.949.395,00	4.560.767.246,70	39,26	4.651.894.677,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	17.500.000.000,00	8.725.188.771,00	49,86	11.988.317.788,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	101.874.737.900,00	110.456.484.344,20	108,42	73.955.484.794,34
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.036.704.209.000,00	998.005.911.794,00	96,27	976.588.696.731,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	938.704.209.000,00	928.906.312.239,00	98,96	908.583.176.239,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	41.500.489.000,00	45.481.437.991,00	109,59	46.728.994.940,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	3.370.191.000,00	3.664.172.037,00	108,72	931.141.219,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	684.408.474.000,00	680.408.474.000,00	99,42	684.408.474.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	209.425.055.000,00	199.352.228.211,00	95,19	176.514.566.080,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	98.000.000.000,00	48.338.999.555,00	49,33	68.005.520.492,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	98.000.000.000,00	48.338.999.555,00	49,33	68.005.520.492,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	20.760.600.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	20.760.600.000,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	60.319.154.000,00	60.319.154.000,00	100,00	63.034.175.150,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	0,00	0,00	664.893.150,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	60.319.154.000,00	60.319.154.000,00	100,00	62.369.282.000,00
5	BELANJA	1.250.606.150.325,00	1.014.725.929.999,08	81,14	1.121.241.908.878,14
5.1	BELANJA OPERASI	931.736.195.455,00	874.186.752.712,08	93,82	842.117.132.058,14
5.1.1	Belanja Pegawai	543.296.552.160,00	546.119.417.164,00	100,52	531.079.011.452,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	366.918.443.295,00	308.496.398.048,08	84,08	289.641.161.505,40
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	1.859.100,74
5.1.5	Belanja Hibah	19.771.200.000,00	17.829.400.000,00	90,18	21.117.600.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00	1.741.537.500,00	99,52	277.500.000,00
5.2	BELANJA MODAL	317.119.954.870,00	139.178.414.287,00	43,89	277.921.020.653,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	61.094.600,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Perakatan dan Mesin	17.236.421.400,00	12.716.086.056,00	73,77	33.526.270.113,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.747.688.225,00	47.333.963.017,00	55,20	52.164.286.266,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	209.496.540.645,00	77.668.226.176,00	37,07	190.216.659.774,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.578.210.000,00	1.460.139.038,00	31,89	2.013.804.500,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.750.000.000,00	1.360.763.000,00	77,76	1.203.756.167,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.750.000.000,00	1.360.763.000,00	77,76	1.203.756.167,00
6	TRANSFER	135.828.201.400,00	135.581.869.141,43	99,82	138.555.262.476,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.000.000.000,00	3.897.635.522,43	97,44	1.531.992.000,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.000.000.000,00	3.897.635.522,43	97,44	1.531.992.000,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	131.828.201.400,00	131.684.233.619,00	99,89	137.023.270.476,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	131.828.201.400,00	131.684.233.619,00	99,89	137.023.270.476,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(108.868.301.430,00)	70.811.738.670,23	(65,04)	(95.500.282.097,80)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	108.868.301.430,00	18.631.988.436,89	17,11	121.241.385.968,00
7.1.1	Penggunaan SILPA	108.868.301.430,00	18.127.093.936,89	16,65	120.847.378.968,00
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	504.894.500,00	0,00	394.007.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	7.461.568.767,31
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	5.916.748.659,00
7.2.3	Pembayaran Pollok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	44.820.108,31
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	108.868.301.430,00	18.631.988.436,89	17,11	113.779.817.200,69
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	89.443.727.107,12	0,00	18.279.535.102,89
<p>Rantauprapat, 31 Desember 2018</p> <p>PR. BUPATI LABUHANBATU</p> <p>ANDI SUHAIMI</p>					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					Halaman 2 dari 2



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	1.500.609.870.663,00	1.318.715.109.320,71	87,88	1.221.119.537.810,74
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	240.318.936.755,00	175.335.685.316,71	72,96	162.794.472.016,74
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	52.550.000.000,00	46.162.440.064,92	87,84	39.052.031.654,84
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.170.131.200,00	4.889.803.514,70	53,32	4.560.767.246,70
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	26.692.760.555,00	16.226.589.877,00	60,79	8.725.188.771,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	151.906.045.000,00	108.056.851.860,09	71,13	110.456.484.344,20
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.127.043.031.908,00	1.012.228.495.149,00	89,81	998.005.911.794,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.009.737.500.000,00	925.148.005.724,00	91,62	928.906.312.239,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	52.643.236.000,00	38.027.497.802,00	72,24	45.481.437.991,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	4.995.684.000,00	3.182.927.079,00	63,71	3.664.172.037,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	714.901.140.000,00	686.644.553.000,00	96,05	680.408.474.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	237.197.440.000,00	197.293.027.843,00	83,18	199.352.228.211,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	117.305.531.908,00	87.080.489.425,00	74,23	48.338.999.555,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	117.305.531.908,00	87.080.489.425,00	74,23	48.338.999.555,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00	0,00	20.760.600.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	20.760.600.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	133.247.902.000,00	131.150.928.855,00	98,43	60.319.154.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	63.021.800.000,00	61.188.280.000,00	97,09	0,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	70.226.102.000,00	69.962.648.855,00	99,62	60.319.154.000,00
5	BELANJA	1.423.877.729.215,00	1.219.197.719.894,99	85,63	1.014.725.929.999,08
5.1	BELANJA OPERASI	1.048.636.384.455,00	978.973.759.477,69	93,36	874.186.752.712,08
5.1.1	Belanja Pegawai	560.927.005.916,00	548.198.864.134,00	97,73	546.119.417.164,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	449.519.178.539,00	398.565.120.343,69	88,66	308.496.388.048,08
5.1.5	Belanja Hibah	36.440.200.000,00	30.669.655.000,00	84,16	17.829.400.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00	1.540.120.000,00	88,01	1.741.537.500,00
5.2	BELANJA MODAL	372.241.344.760,00	238.729.009.917,30	64,13	139.178.414.287,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	464.500.000,00	28.450.000,00	6,12	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.519.070.132,00	30.971.133.273,00	63,83	12.716.086.056,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	116.340.726.750,00	73.451.178.853,30	63,13	47.333.963.017,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jembatan	201.964.158.428,00	122.594.326.524,00	60,70	77.668.226.176,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.952.889.450,00	11.683.921.267,00	235,90	1.460.139.038,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000,00	1.494.950.500,00	49,83	1.360.763.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00	1.494.950.500,00	49,83	1.360.763.000,00
6	TRANSFER	155.683.108.000,00	148.322.246.407,00	95,27	135.581.869.141,43
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	6.500.000.000,00	2.002.779.579,00	30,81	3.897.635.522,43
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	6.500.000.000,00	2.002.779.579,00	30,81	3.897.635.522,43
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	149.183.108.000,00	146.319.466.828,00	98,08	131.684.233.619,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	149.183.108.000,00	146.319.466.828,00	98,08	131.684.233.619,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(78.950.966.552,00)	(48.804.856.981,28)	61,82	70.811.738.670,23
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.443.727.107,00	90.364.371.720,12	101,03	18.631.988.436,89
7.1.1	Penggunaan SILPA	89.443.727.107,00	89.892.319.720,12	100,50	18.127.093.936,89
7.1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	472.052.000,00	0,00	504.894.500,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.492.760.555,00	9.792.760.555,00	93,33	0,00
7.2.2	Penyerahan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9.192.760.555,00	9.192.760.555,00	100,00	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
7.2.5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	78.950.966.552,00	80.571.611.165,12	102,05	18.631.988.436,89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	31.766.754.183,84	0,00	89.443.727.107,12

Rantauprapat, 31 Desember 2019
BUPATI LABUHANBATU

ANDI SUHAIMI



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	1.315.981.548.668,00	1.177.755.366.136,15	89,50	1.318.715.109.320,71
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	225.869.464.200,00	161.486.609.119,15	71,50	175.335.685.316,71
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	57.700.000.000,00	41.544.340.012,28	72,00	46.162.440.064,92
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	9.170.131.200,00	4.802.651.684,00	52,37	4.889.803.514,70
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.440.288.000,00	8.242.333.014,00	78,95	16.226.589.877,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	148.559.045.000,00	106.897.284.408,87	71,96	108.056.851.860,09
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	955.305.713.468,00	866.368.570.365,00	90,69	1.012.228.495.149,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	849.687.879.118,00	803.359.127.401,00	94,55	925.148.005.724,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	49.699.821.734,00	26.250.353.858,00	52,82	38.027.497.802,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	3.840.806.384,00	2.821.384.692,00	73,46	3.182.927.079,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	652.519.523.000,00	633.797.327.000,00	97,13	686.644.553.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	143.627.728.000,00	140.490.061.851,00	97,82	197.293.027.843,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	105.617.834.350,00	63.009.442.964,00	59,66	87.080.489.425,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	105.617.834.350,00	63.009.442.964,00	59,66	87.080.489.425,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	134.806.371.000,00	149.900.186.652,00	111,20	131.150.928.855,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	63.434.200.000,00	78.640.160.310,00	123,97	61.188.280.000,00
4.3.3	Pendapatan Lainnya - LRA	71.372.171.000,00	71.260.026.342,00	99,84	69.962.648.855,00
5	BELANJA	1.207.638.199.152,00	1.066.968.079.257,92	88,35	1.219.197.719.894,99
5.1	BELANJA OPERASI	1.011.307.050.995,00	907.522.147.657,42	89,74	978.973.759.477,69
5.1.1	Belanja Pegawai	537.915.347.336,00	496.986.537.289,00	92,39	548.198.864.134,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	397.223.757.159,00	341.273.448.988,42	85,91	398.565.120.343,69
5.1.5	Belanja Hibah	74.417.946.500,00	68.763.561.380,00	92,40	30.669.655.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00	498.600.000,00	28,49	1.540.120.000,00
5.2	BELANJA MODAL	146.331.148.157,00	136.621.343.879,00	93,36	238.729.009.917,30
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	28.450.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.425.772.550,00	36.377.301.607,00	143,07	30.971.133.273,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.844.262.846,00	37.878.000.218,00	92,74	73.451.178.853,30
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	59.160.167.413,00	48.114.699.766,00	81,33	122.594.326.524,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.900.945.348,00	14.251.342.288,00	68,19	11.683.921.267,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	50.000.000.000,00	22.824.587.721,50	45,65	1.494.950.500,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	50.000.000.000,00	22.824.587.721,50	45,65	1.494.950.500,00


NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
6	TRANSFER	139.510.103.700,00	120.892.102.250,34	86,65	148.322.246.407,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	4.000.000.000,00	2.512.752.058,34	62,82	2.002.779.579,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.000.000.000,00	2.512.752.058,34	62,82	2.002.779.579,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	135.510.103.700,00	118.379.350.192,00	87,36	146.319.466.828,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	135.510.103.700,00	118.379.350.192,00	87,36	146.319.466.828,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.166.754.184,00)	(10.104.815.372,11)	32,42	(48.804.856.981,28)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	31.766.754.184,00	31.973.688.183,84	100,65	90.364.371.720,12
7.1.1	Penggunaan SILPA	31.766.754.184,00	31.766.754.183,84	100,00	89.892.319.720,12
7.1.5	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	206.934.000,00	0,00	472.052.000,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	9.792.760.555,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	9.192.760.555,00
7.2.3	Pembayaran Poltek Pinjaman Dalam Negeri	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	31.166.754.184,00	31.373.688.183,84	100,66	80.571.611.165,12
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	21.268.872.811,73	0,00	31.766.754.183,84
Rantauprapat, 31 Desember 2020 BUPATI LABUHANBATU ERIK ADTRADA RITONGA					



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	1.363.423.473,097,00	1.342.106.703.518,75	98,44	1.177.755.366.136,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	239.690.323.904,00	238.194.215.393,75	99,38	161.486.609.119,15
4.1.1	Pajak Daerah	113.830.121.950,00	114.555.278.697,00	100,64	41.544.340.012,28
4.1.2	Retribusi Daerah	9.225.131.200,00	5.660.133.871,15	61,36	4.802.651.684,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.135.070.754,00	12.136.721.336,00	100,01	8.242.333.014,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	104.500.000.000,00	105.842.081.489,60	101,28	106.897.284.408,87
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.036.240.365.193,00	1.025.053.249.700,00	98,92	866.368.570.365,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	956.240.365.193,00	953.988.763.895,00	99,76	803.359.127.401,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	881.762.948.193,00	879.511.346.895,00	99,74	803.359.127.401,00
4.2.1.5	Dana Desa	74.477.417.000,00	74.477.417.000,00	100,00	0,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	80.000.000.000,00	71.064.485.805,00	88,83	63.009.442.964,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	80.000.000.000,00	71.064.485.805,00	88,83	63.009.442.964,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	87.492.784.000,00	78.859.238.425,00	90,13	149.900.186.652,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	100,00	78.640.160.310,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	84.692.784.000,00	76.059.238.425,00	89,81	71.260.026.342,00
5	BELANJA DAERAH	1.377.938.913.408,00	1.266.143.502.119,61	91,89	1.187.860.181.508,26
5.1	BELANJA OPERASI	1.056.287.743.551,00	960.442.859.433,09	90,93	907.522.147.657,42
5.1.1	Belanja Pegawai	608.993.749.588,00	589.896.794.109,00	96,86	496.986.537.289,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	424.560.200.084,00	353.769.801.445,09	83,33	341.273.448.988,42
5.1.5	Belanja Hibah	18.516.793.879,00	16.307.063.879,00	88,07	68.763.561.380,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.217.000.000,00	469.200.000,00	11,13	498.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	142.566.208.707,00	135.676.696.802,52	95,17	136.621.343.879,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.170.129.992,00	61.546.495.154,00	111,56	36.377.301.607,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.091.684.751,00	13.262.283.954,52	66,01	37.878.000.218,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Trijaksi	66.660.875.964,00	51.249.849.670,00	76,88	48.114.699.766,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	643.518.000,00	9.618.068.024,00	1.494,61	14.251.342.288,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.500.000.000,00	3.759.688.494,00	35,81	22.824.587.721,50
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	10.500.000.000,00	3.759.688.494,00	35,81	22.824.587.721,50
5.4	BELANJA TRANSFER	168.584.961.150,00	166.264.257.390,00	98,62	120.892.102.250,34
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	9.100.000.000,00	6.903.000.000,00	75,86	2.512.752.058,34
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	159.484.961.150,00	159.361.257.390,00	99,92	118.379.350.192,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.515.440.311,00)	75.963.201.399,14	(523,33)	(10.104.815.372,11)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.268.872.811,00	21.529.972.377,73	101,23	31.973.688.183,84
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.268.872.811,00	21.401.299.377,73	100,62	31.766.754.183,84
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	128.673.000,00	0,00	206.934.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.753.432.500,00	6.753.432.500,00	100,00	600.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	6.160.000.000,00	6.160.000.000,00	100,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	593.432.500,00	593.432.500,00	100,00	600.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	14.515.440.311,00	14.776.539.877,73	101,80	31.373.688.183,84
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	90.739.741.276,87	0,00	21.268.872.811,73
Rantauprapat, 31 Desember 2021 BUPATI LABUHANBATU ERIK ADRADA RITONGA					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU												
2	LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH												
3	UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021												
4													
5													
6	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI							
7			2022	2022		2021							
8	PENDAPATAN DAERAH		1,328,205,416,207.00	1,251,239,536,921.87	94.21	1,342,106,703,518.75							
9	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		214,870,699,556.00	184,403,843,981.87	85.82	238,194,215,393.75							
10	Pajak Daerah		87,922,715,306.00	58,160,437,656.00	66.15	114,555,278,697.00							
11	Retribusi Daerah		9,787,500,000.00	5,246,435,907.00	53.60	5,660,133,871.15							
12	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		12,160,484,250.00	12,160,484,250.00	100.00	12,136,721,336.00							
13	Lain-lain PAD Yang Sah		105,000,000,000.00	108,836,486,168.87	103.65	105,842,081,489.60							
14	PENDAPATAN TRANSFER		1,098,334,716,651.00	1,055,080,539,114.00	96.06	1,025,053,249,700.00							
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1,000,334,716,651.00	957,042,058,857.00	95.67	953,988,763,895.00							
16	Dana Perimbangan		932,651,865,651.00	889,634,012,327.00	95.39	879,511,346,895.00							
17	Dana Desa		67,682,851,000.00	67,408,046,530.00	99.59	74,477,417,000.00							
18	Pendapatan Transfer Antar Daerah		98,000,000,000.00	98,038,480,257.00	100.04	71,064,485,805.00							
19	Pendapatan Bagi Hasil		85,000,000,000.00	81,771,214,851.00	96.20	71,064,485,805.00							
20	Bantuan Keuangan		13,000,000,000.00	16,267,265,406.00	125.13	0.00							
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		15,000,000,000.00	11,755,153,826.00	78.37	78,859,238,425.00							
22	Pendapatan Hibah		0.00	0.00	0.00	2,800,000,000.00							
23	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan		15,000,000,000.00	11,755,153,826.00	78.37	76,059,238,425.00							
24	BELANJA DAERAH		1,413,945,157,484.00	1,301,836,435,729.18	92.07	1,266,143,502,119.61							
25	BELANJA OPERASI		1,066,968,971,260.00	968,089,787,798.51	90.73	960,442,659,433.09							
26	Belanja Pegawai		597,049,224,511.00	568,939,120,202.00	95.29	589,896,794,109.00							
27	Belanja Barang dan Jasa		443,782,646,870.00	381,061,894,801.51	85.87	353,769,801,445.09							
28	Belanja Hibah		24,637,099,879.00	18,088,772,795.00	73.42	16,307,063,879.00							
29	Belanja Bantuan Sosial		1,500,000,000.00	0.00	0.00	469,200,000.00							
30	BELANJA MODAL		187,400,735,924.00	181,049,989,418.67	96.61	135,676,696,802.52							
31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		35,798,014,245.00	32,779,753,316.00	91.57	61,546,495,154.00							
32	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		27,616,353,518.00	21,355,520,394.99	77.33	13,262,283,954.52							
33	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		123,354,197,161.00	119,076,284,429.68	96.53	51,249,849,670.00							
34	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		632,171,000.00	7,838,431,278.00	1,239.92	9,618,068,024.00							
35	BELANJA TIDAK TERDUGA		8,000,000,000.00	6,502,633,986.00	81.28	3,759,688,494.00							
36	Belanja Tidak Terduga		8,000,000,000.00	6,502,633,986.00	81.28	3,759,688,494.00							
37	BELANJA TRANSFER		151,575,450,300.00	146,194,024,526.00	96.45	166,266,257,390.00							
38	Belanja Bagi Hasil		14,200,000,000.00	9,664,969,000.00	68.06	6,903,000,000.00							
39	Belanja Bantuan Keuangan		137,375,450,300.00	136,529,055,526.00	99.38	159,361,257,390.00							
40	SURPLUS / (DEASIT)		(85,739,741,277.00)	(50,596,898,807.31)	59.01	75,963,201,399.14							
41	PEMBIAYAAN DAERAH		90,739,741,277.00	89,644,830,271.87	98.79	21,529,972,377.73							
42	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		90,739,741,277.00	89,601,820,271.87	98.75	21,401,299,377.73							
43	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		90,739,741,277.00	89,601,820,271.87	98.75	21,401,299,377.73							
44	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	43,010,000.00	0.00	128,673,000.00							
45	PENGLUARAN PEMBIAYAAN		5,000,000,000.00	4,481,828,990.00	89.64	6,753,432,500.00							
46	Pengertian Modal Daerah		5,000,000,000.00	4,481,828,990.00	0.00	6,160,000,000.00							
47	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0.00	0.00	0.00	593,432,500.00							
48	PEMBIAYAAN NETTO		85,739,741,277.00	85,163,001,281.87	99.33	14,776,539,877.73							
49	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0.00	34,566,102,474.56	0.00	90,739,741,276.87							
50	Printed by Simbil												
51													
52	BUPATI LABUHANBATU,												
53													
54													
55	ERIK ADTRADA RITONGA												
56													
57													



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 16/01/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN
NPM : 1905170192
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1 : tingkat efektif dan efisien pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018-2021. Judul 2 : masih rendahnya rasio kemandirian dan rasio desentralisasi pada kinerja pegawai tahun 2018-2021, tingginya rasio efisien pada kinerja pegawai tahun 2018-2021. Judul 3 : rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah

Rencana Judul : 1. Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2018-2021
2. Analisis rasio kemandirian, rasio desentralisasi dan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan tahun 2018-2021
3. Analisis kinerja keuangan daerah tahun 2018-2021

Objek/Lokasi Penelitian : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN)

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/16/01/2023

Nama Mahasiswa : ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN
NPM : 1905170192
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Tanggal Pengajuan Judul : 16/01/2023
Nama Dosen pembimbing*) : Umi Kalsum, SE., M.Si (31 Januari 2023)

Judul Disetujui**)

: Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 - 2021

Medan,

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zuhra Hanum, S.E., M.Si.)

Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum, SE., M.Si.)

Keterangan:

*) Disetujui oleh Pimpinan Program Studi

***) Disetujui oleh Dosen Pembimbing setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 384/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Annisa Oktafiyani Pulungan
N P M : 1905170192
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun
2018-2021

Dosen Pembimbing : Umi Kalsum, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **11 Februari 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Rajab 1444 H
11 Februari 2023 M

Dekan


Dekan



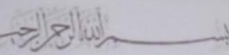


PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : ANNISA OKTAFIYANI P

NPM : 1905170192

Tempat/Tgl Lahir : KISARAN 06-10-2000

Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasisw : JL. CEMARA 2 NO. 12

Tempat Penelitian: BADAN KESATUAN BANGSA & PD LITIK KAB. LABUHAN BATU

Alamat Penelitian : JL. W. R. SUPRATMAN KABUPATEN TEN LABUHAN BATU

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam
Pemohon

(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

(ANNISA OKTAFIYANI PULLUNGAN)



UMSU
Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Pusat Administrasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsu](#)

Nomor : 383/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 20 Rajab 1444 H
11 Februari 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Labuhanbatu
Jln. W. R. Supratman Kabupaten Labuhanbatu
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Annisa Oktafiyani Pulungan
Npm : 1905170192
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018-2021

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JALAN H.M. IDRIS HASIBUAN NO. TELP. (0624) 21173 FAX. 24815
RANTAUPRAPAT

Nomor : 800/ 592 /BPKAD/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Tempat
Izin Penelitian Riset
Annisa Oktafiyani Pulungan

Rantauprapat, 20 Februari 2023

Kepada Yth.
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fak. Ekonomi dan Bisnis
di-
Medan

1. Sehubung dengan surat Saudara Nomor. 076/0184/BKBP-III/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Izin Penelitian Riset, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk menerima Mahasiswa tersebut melaksanakan Penelitian dimaksud mulai tanggal 21 Februari 2023 sampai 7 Maret 2023
2. Perlu kami sampaikan bahwa selama mengikuti kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu setiap peserta Penelitian harus sanggup untuk mentaati setiap ketentuan yang berlaku di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu, sesuai dengan kedisiplinan dan ketentuan lainnya.
3. Demikian hal ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU



SALMAN ALPIYARISI RAMBE, S.Sos.MM
PEMBINA
NIP. 200502 1 004



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
UMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANNISA OKTAFIYANI PULUNGAN
NPM : 1905170192
Dosen Pembimbing : UMI KALSUM S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Penelitian : ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU T.A 2018-2022.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	Fenomena latar belakang, Rumusan Masalah, Sesuaikan penusunan dengan penyusunan proposal.	7/3/2023	
Bab2	Tambahkan teori pendukung dan kerangka konsep. Penelitian terdahulu.	9/3/2023	
Bab3	Teknik analisis data, Pengambilan data, tabel jadwal Penelitian.	9/3/2023	
Daftar Pustaka	Masukkan semua kutipan yang diambil untuk Penelitian.	29/5/2023	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Lengkapi lampiran	29/5/2023	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC Seminar Proposal	5/6/2023	

Dosen Pembimbing

(Umi Kalsum, S.E., M.Si)

Medan, 2023

Diketahui/ Disetujui

Sekretaris Program Studi Akuntansi

(Riva Ubar Harahap, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)



BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini **Kamis, 22 Juni 2023** telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Annisa Oktafiyani Pulungan*
NPM. : 1905170192
Tempat Tgl.Lahir : Kisaran, 06 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jl. Cemara II No.12
Judul Proposal : Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Perbaiki latar belakang dan identifikasi masalah</i>
Bab II	<i>Perbaiki cara pengutipan teori; tambah teori tentang peran keuangan daerah</i>
Bab III	<i>Perbaiki definisi operasional</i>
Lainnya	<i>Tambah daftar pustaka</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

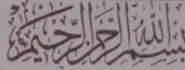
Umi Kalsum, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Syafida Hani, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 22 Juni 2023* menerangkan bahwa:

Nama : Annisa Oktafiyani Pulungan
NPM : 1905170192
Tempat / Tgl.Lahir : Kisaran, 06 Oktober 2000
Alamat Rumah : Jl. Cemara II No.12
Judul Proposal : Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Umi Kalsum, SE., M.Si*

Medan, 22 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Umi Kalsum, SE., M.Si

Pembanding

Dr. Hj. Syafrida Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gurawan, SE, M.Si
NIDN : 0105087601



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Nomor : 1988/IL.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 17 Muharam 1445 H
04 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
Jln. Muhammad Idris Hasibuan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Annisa Oktafiyani Pulungan
N P M : 1905170192
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu T.A 2018-2022

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Pertinggal



Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

JALAN H.M. IDRIS HASIBUAN No. TELP. (0624)
RANTAUPRAPAT

Rantauprapat, 07 Agustus 2023

Nomor : 800/2289 / BPKAD/ 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Yth. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fak. Ekonomi dan Bisnis
di-
Medan

Sehubungan dengan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1988/II.AU/UMSU-05/F/2023 tanggal 04 Agustus 2023 perihal Menyelesaikan Riset, kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i tersebut :

Nama : Annisa Oktafiyani Pulungan
N P M : 1905170192
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akutansi
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Memang benar telah menyelesaikan Penelitian Riset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Demikian hal tersebut kami sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU



SALMAN ALPHARISI RAMBE, S.Sos, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19781128 200502 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama : Annisa Oktafiyani Pulungan
NPM : 1905170192
Tempat/ Tanggal Lahir : Kisaran, 06 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jl. Cemara II No. 12 Ujung Bandar Rantau Selatan
Program Studi : Akuntansi
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Email : annisaoktafiyanipulungan@gmail.com
HP : 0895-2423-5091

2. Nama Orang Tua
Ayah : Taufik Pulungan
Ibu : Sri Rahmayanti

3. Jenjang Pendidikan
 - SD Negeri 116875 Rantau Selatan 2012
 - SMP Negeri 01 Rantau Selatan 2015
 - SMA Negeri 3 Rantau Utara 2018
 - Tercatat sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2023 sampai sekarang.

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya

Annisa Oktafiyani Pulungan

